



Judul : DPR Dijaga 300 Pamdal, Gajinya Sebulan 2,7 Juta: Karena Sering Lembur, Gajinya Diusulkan Naik
Tanggal : Senin, 12 Januari 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Dijaga 300 Pamdal, Gajinya Sebulan 2,7 Juta

Karena Sering Lembur, Gajinya Diusulkan Naik

Sekretariat Jenderal DPR mengelola sejumlah anggaran terkait kebutuhan internal para anggota dewan. Berbagai proyek Setjen DPR melibatkan anggaran banyak. Salah satunya pengadaan personel keamanan komplek gedung wakil rakyat.

LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mensinyalir ada kebocoran pada pengadaan tenaga keamanan Setjen DPR setiap tahun.

Pada tahun 2014, Setjen DPR mengalokasikan dana sebesar Rp 16,8 miliar, tetapi pemenang tender PT Gaia Prima Proteksindo menawar Rp 15,8 miliar.

Anehnya, jumlah personel pasukan pengamanan dalam atau pamdal DPR hanya 300 orang dengan gaji rata-rata Rp 2,7 juta per orang. Artinya, hanya menghabiskan dana Rp. 9,7 miliar.

“Kalaupun ada belanja untuk operasional dan administrasi kantor, paling hanya menghabiskan Rp 1 miliar. Jadi sisa anggaran sekitar Rp 5 miliar, ke kantong siapa dana ini menguap?” kata Koordinator LSM Fitra, Uchok Sky Khadafi, kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Lembaga swasta yang konsen

pada isu pengelolaan anggaran negara ini menilai, pelaksanaan tender-tender Setjen DPR juga kurang transparan. Uchok mengaku, belum pernah mengetahui ada pengumuman tender pengadaan barang dan jasa Setjen DPR. Tahu-tahu sudah ada perusahaan pemenangnya.

Nah, Setjen DPR kembali menaikkan anggaran pengadaan Pamdal DPR pada APBN 2015 menjadi Rp16,6 miliar. Jumlah personel pamdal DPR tetap 300 orang dengan gaji Rp 2,7 juta perbulan per orang. Maka setahun bayar gaji mereka sebesar Rp 9,7 miliar.

“Pada tahun 2014 ada dugaan anggaran menguap Rp 5 miliar, kemungkinan tahun 2015 ini ada potensi menguap sebesar Rp 5,9 miliar,” kata Uchok.

Menanggapi temuan LSM Fitra, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR,

Irma Chaniago berkelit. Menurut Anggota DPR yang baru menjabat itu, banyak personel pengamanan DPR kerja lembur. Jadi ada biaya lembur selain gaji.

Politikus Partai Nasdem itu menambahkan, jumlah personel pengamanan dalam gedung DPR masih kurang, dibanding luasnya area kantor para wakil rakyat itu.

Karena itu, pada masa mendatang dia berharap ada penambahan jumlah personel pengamanan. Sebab, idealnya tidak ada lembur untuk petugas keamanan. “Tugas mereka berat. Tentu harus ada kenaikan gaji,” katanya.

Mantan orang Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok itu mengaku, akan menanyakan kepada Setjen DPR soal dugaan kebocoran anggaran pengadaan personel keamanan ini.

“Kami akan minta Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab. Kami bukan hanya mengawasi penggunaan anggaran pemerintah, juga penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal DPR. Semua harus bersih. Malu dong kalau tidak bersih,” cetusnya. ■ QAR